



# Postgraduate Community Service Journal

Jurnal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/pcsj>

## Pendampingan Gerakan Wanita Sejahtera Taat Pajak dan Upaya Peningkatan Usaha Berbasis Ekowisata

I Gusti Agung Prama Yoga<sup>1\*</sup>, I Wayan Chandra Adyatma<sup>2</sup>, dan I Putu Gede Satria Wiraharja<sup>2</sup>

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Indonesia

2. Fakultas Vokasi, Universitas Warmadewa, Indonesia

\*pramayoga13@gmail.com

### How to Cite:

Yoga, I, G, A, P., Adyatma, I, W, C., Wiraharja, I, P, G, S. (2024). Pendampingan Gerakan Wanita Sejahtera Taat Pajak dan Upaya Peningkatan Usaha Berbasis Ekowisata. *Postgraduate Community Service Journal*, 5(1), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.22225/pcsj.5.1.2024.1-8>

### Abstract

Indonesia has 3 tax systems, including the Self Assessment System, the Official Assessment System and the Withholding Assessment System. Self assessment is a tax collection system that gives trust and responsibility to taxpayers to take the initiative in registering themselves to obtain a Taxpayer Identification Number (NPWP) and take care of all their tax affairs independently. Starting from calculating, paying and reporting the annual tax return (SPT) itself. Annual personal income tax return (PPh OP) reporting must be carried out every year by taxpayers who have met the objective and subjective requirements no later than (report the OP tax return) at the end of March. Tax Return reporting has been mandated in the Law on General Provisions and Tax Procedures (KUP) article 3, where every taxpayer is required to fill out the tax return correctly, clearly and completely, and for the annual Income Tax Return OP must be submitted no later than 3 months after the tax year ends (WP OP) or no later than 4 months after the tax year ends (Corporate WP). The Prosperous Women's Movement is one of the non-political women's organizations that has a vision of improving women's empowerment. Taxes are mandatory contributions by taxpayers for state development. Women must now be sensitive to the times, educated and willing to learn. The theme of this PkM is smart women who obey taxes. The method used is to socialize taxation and ecotourism business opportunities, discussions, and mentoring. The assistance provided includes the preparation of NIK and NPWP as well as personal tax reporting. Women must have intelligence, because the world is too harsh if it is only devoted to beauty. Our taxes, for us. Wisely fulfilling tax obligations, then the development of the country will continue to develop. Warmadewa University advances the country from education and implements the tri dharma of higher education to prepare quality human resources, ecotourism insights, and global competitiveness.

**Keywords:** ecotourism; self assessment system; SPT-OP; tax

### Abstract:

Indonesia memiliki 3 sistem perpajakan diantaranya Self Assessment System, Official Assessment System dan Withholding Assessment System. Self assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) sendiri. Pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) wajib dilakukan setiap Tahun oleh Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif paling lambat dipenuhi (lapor SPT OP) pada akhir bulan maret.

Pelaporan SPT telah diamanatkan pada UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 3, dimana setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap, dan untuk SPT tahunan PPh OP wajib disampaikan paling lama 3 bulan setelah tahun pajak berakhir (WP OP) atau paling lama 4 bulan setelah tahun pajak berakhir (WP Badan). Gerakan Wanita Sejahtera merupakan salah satu organisasi Wanita non politik yang memiliki visi peningkatan pemberdayaan perempuan. Pajak merupakan iuran wajib oleh Wajib Pajak untuk pembangunan negara. Perempuan kini harus peka terhadap perkembangan zaman, teredukasi dan mau belajar. Tema PkM ini adalah perempuan cerdas taat pajak. Metode yang digunakan adalah melakukan sosialisasi perpajakan serta peluang bisnis ekowisata, diskusi, dan pendampingan. Pendampingan yang diberikan meliputi pamadanan NIK dan NPWP serta pelaporan pajak orang pribadi. Perempuan harus punya kecerdasan, karena dunia terlalu keras jika hanya mengabdikan kecantikan. Pajak kita, untuk kita. Bijak memenuhi kewajiban pajak, maka pembangunan negeri akan terus berkembang. Universitas Warmadewa memajukan negeri dari Pendidikan dan melaksanakan tri darma perguruan tinggi untuk menyiapkan SDM bermutu, berwawasan ekowisata, berdaya saing global.

**Kata Kunci:** ekowisata; *Self Assessment System*; Pajak; SPT-OP

## 1. Pendahuluan

Peran perempuan di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, terbukti dari meningkatnya jumlah angka kerja perempuan di berbagai bidang pembangunan. Sebut saja adanya kebijakan afirmasi terkait alokasi 30 persen bagi legislator perempuan, dibentuknya kelembagaan terkait peran perempuan seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Komnas Perempuan, dan legislasi untuk melindungi perempuan dan anak, (Doni, 2022). Di Indonesia, penduduk perempuan mencapai 49,5 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 273 juta. Dengan memberdayakan perempuan sesuai potensinya, diharapkan bisa membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 2021, tercatat 54% UMKM dimiliki perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat signifikan.

Peran perempuan dalam ekonomi juga tampak dari sektor kewirausahaan. Tak bisa dipungkiri bahwa hingga kini, laki-laki masih mendominasi dalam dunia kerja. Oleh sebab itu, banyak perempuan yang mulai membuka mata dan melihat peluang besar di sektor kewirausahaan. Para perempuan pun banyak yang membuka usaha hingga menjadi karyawan. Bahkan 54% dari para pelaku UMKM dan 97% pegawai didominasi oleh perempuan. Keberadaan UMKM ini merupakan wujud nyata dari kemandirian perempuan dan pembuktian diri bahwa kaum wanita tidak selalu bergantung kepada orang lain. Bertambahnya sektor UMKM ini juga diharapkan mampu meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi di Indonesia. Meski begitu, keputusan perempuan untuk mendorong kemandirian ekonomi dengan membuka usaha tidaklah mudah. Keputusan tersebut didukung oleh adanya minat, motivasi, proses pemberdayaan diri, hingga lingkungan sosial.

Dikutip dari artikel Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jendral Pembendaharaan, Pandemi memberikan dampak yang lebih besar kepada kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Di Indonesia, 53,76% UMKM dimiliki oleh perempuan dimana 97% karyawannya juga perempuan, dengan kontribusinya terhadap PDB mencapai 61%, investasi 60%, dan ekspor 14,4%. Tabel 1. Memberikan gambaran betapa besar peran perempuan dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah mendukung penuh penerapan kesetaraan gender dengan menciptakan pengelolaan APBN yang bersifat responsif gender, diantaranya melalui alokasi DAK Non Fisik untuk Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Tidak dapat dipungkiri pentingnya peranan perempuan di keluarga, bahkan negara. Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan non

politik dan tidak menjadi bagian dari suatu partai politik. Asasnya ialah sosialisme kerakyatan berdasarkan falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945. Sebagai organisasi wanita GW . terutama memperjuangkan peningkatan kedudukan dan martabat wanita disegala bidang, semenjak tahun 1995. Visi GWS adalah menunjanj program pemerintah dibidang perkoperasian, untuk Menolong/menyejahterakan anggota GWS melalui koperasi serta usaha yang mempunyai unit simpan pinjam dimana setiap anggota dapat meminjam uang dalam jumlah tertentu untuk meningkatkan usahanya. GWS merupakan salah satu dari banyaknya organisasi perempuan yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Melalui hal ini dapat kita lihat Women’s Power yang tidak dapat dinilai sebelah mata. GWS tersebar luas diseluruh Indonesia, diantaranya Dewan Pengurus Cabang Bali (GWS DPC Bali) lebih spesifik, GWS Kota Denpasar. Beranggotakan dari para Wanita yang berasal dari berbagai profesi antara lain Pengusaha (UMKM), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, dan Ibu Rumah Tangga. Guna mencapai kesejahteraan, salah satunya dapat dilakukan dengan peningkatan pendapatan untuk mengupayakan kemakmuran dari segi ekonomi. Maka, salah satu aktivitas yang dilakukan organisasi GWS adalah melakukan pelatihan, seminar dan pendampingan.

**Tabel 1.** Dampak Covid terhadap gender dan pencapaian SDGs di Indonesia.

 Berkurangnya Pendapatan	<b>82% perempuan</b>	80% laki-laki
 Dampak Kesehatan	<b>57% perempuan</b> mengalami peningkatan stres dan kecemasan	48% laki-laki
 Kesetaraan Gender	<b>19% perempuan</b> mengalami peningkatan intensitas pekerjaan rumah tangga tak berbayar	11% laki-laki
 Pendidikan	<b>39% perempuan</b> lebih banyak waktu untuk mengikuti PJJ anak	29% laki-laki
 Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi	<b>36% perempuan</b> pekerja informal harus mengurangi waktu kerja berbayar	30% laki-laki



Gambar 1. Persentase Posisi Perempuan dalam hal menyumbang penghasilan keluarga dan perempuan sebagai tenaga profesional.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

Grafik 1 memberikan kita gambaran bahwa perempuan memiliki peranan yang cukup spesifik bagi perekonomian keluarga, bahkan hampir setengahnya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kontribusi, tidak hanya berperan pasif. Berikut ini, data jumlah penduduk provinsi Bali berdasarkan gender.

**Tabel 2.** Tabel Proyeksi Jumlah penduduk berdasarkan gender di Provinsi Bali.

Kabupaten/Kota	Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota (Ribu Jiwa)								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kab. Badung	277,0	279,7	282,4	275,8	278,4	281,0	552,8	558,1	563,3
Kab. Bangli	130,6	131,1	131,6	128,7	129,3	129,8	259,3	260,4	261,4
Kab. Buleleng	400,3	403,3	406,2	396,1	399,4	402,7	796,4	802,8	808,9
Kab. Gianyar	259,2	260,3	261,4	258,5	260,6	262,7	517,7	520,9	524,0
Kab. Jembrana	159,6	160,8	162,0	159,2	160,3	161,5	318,8	321,2	323,5
Kab. Karangasem	249,9	250,5	251,1	245,0	247,0	248,9	494,9	497,5	500,0
Kab. Klungkung	103,9	104,3	104,7	103,4	103,7	104,0	207,3	208,1	208,7
Kab. Tabanan	231,7	232,1	232,5	231,2	232,4	233,6	462,9	464,5	466,1
Kota Denpasar	370,4	374,3	378,1	362,9	366,7	370,3	733,3	741,0	748,4
<b>Provinsi Bali</b>	<b>2 182,6</b>	<b>2 196,5</b>	<b>2 209,7</b>	<b>2 160,8</b>	<b>2 177,9</b>	<b>2 194,5</b>	<b>4 343,5</b>	<b>4 374,3</b>	<b>4 404,3</b>

Data proyeksi 2010-2014 berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2010; Data proyeksi 2015-2019 berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015; Data 2020 berdasarkan Sensus Penduduk (SP2020), Data proyeksi 2021-2023 berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2020.

Mayoritas jumlah laki-laki memang lebih banyak, namun selisihnya hanya sedikit. Maka sangat penting menggali dan memaksimalkan potensi perempuan. Salah satu program yang dijalankan GWS adalah pendampingan usaha perempuan, dalam hal ini pendampingan UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Kepala Dinas UMKM Provinsi Bali, I Wayan Ekadina jumlah UMKM di Bali pada 2022 per Mei mencapai 440.609 unit. Sedangkan di 2021, jumlah UMKM di Bali mencapai 412.265 unit.



**Gambar 2.** Gambaran Pertumbuhan UMKM di Bali dari Tahun ke Tahun  
 Sumber: data diolah, 2023

Jumlah UMKM di Bali mengalami kenaikan setiap tahunnya, Pandemi covid berdampak pada menurunnya revenue perusahaan dan sektor-sektor primer di Bali, namun disisi lain penurunan yang menyebabkan banyaknya PHK menghasilkan banyaknya UMKM baru. Fenomena menunjukkan bahwa peningkatan UMKM yang signifikan ini berasal dari individu dengan latar belakang bervariasi. Tidak sedikit yang belum memiliki pengetahuan, kualifikasi baik dan pengalaman berwirausaha yang mengapung menjadi salah satu kendala sulitnya UMKM untuk berkembang (Lonela at al, 2011). Faktor penting lainnya adalah kendala pengelolaan keuangan dan Pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memudahkan penghitungan pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 melalui implementasi tarif efektif rata-rata (TER). Kebijakan yang berlaku mulai 1 Januari 2024 tersebut memberikan kemudahan yang tercermin dari kesederhanaan cara penghitungan pajak terutang dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif. Tidak terdapat penambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif sedangkan tarif tetap menggunakan ketentuan yang berlaku saat ini.

Kebijakan tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. PMK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2023. Pasal 13 PMK 168 tahun 2023 secara khusus mengatur ketentuan mengenai penggunaan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) untuk memudahkan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21. Lebih lanjut, tarif efektif yang dimaksud terdiri atas tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Dalam skema penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang menggunakan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a UU PPh, penerapan tarif efektif bulanan misalnya pada pegawai tetap hanya digunakan dalam menghitung PPh Pasal 21 setiap masa pajak selain masa pajak terakhir. Sedangkan penghitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh.

Tujuan dilakukannya PBM ini adalah memberikan pendampingan pada Wajib Pajak dalam kegiatan ini yaitu anggota GWS Kota Denpasar dalam memenuhi kewajiban administratif perpajakan, antara lain mendaftarkan NPWP, menghitung, membayar dan melaporkan pajak orang pribadi bagi anggota yang sudah memiliki NPWP. Selain itu juga dilaksanakan discussion group untuk memberikan edukasi terkait pengembangan wirausaha dan peluang ekowisata. Sasaran dari kegiatan ini adalah perempuan yang masuk kedalam organisasi Gerakan Wanita Sejahtera.

Tabel 3. Solusi yang ditawarkan dan Peran Mitra

No	Solusi yang ditawarkan	Partisipasi Mitra
1.	Memberi handout untuk bahan bacaan bagi para peserta berkaitan dengan topik bahasan Kewajiban perpajakan, kewirausahaan dan ekowisata.	Mitra berkontribusi dalam menyiapkan peserta, dan tempat untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan. Menjadi narahubung
2.	Melakukan pendampingan dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak orang pribadi (PPh)	Pelaksana dan Peserta Kegiatan, serta memberi masukan atas kegiatan yang dilakukan.
3.	Konsultasi Lanjutan.	

Maka, dari pemaparan diatas kami melaksanakan program pendampingan GWS Kota Denpasar dalam hal perpajakan, kewirausahaan dan ekowisata. Program pendampingan yang akan diberikan adalah pendampingan pengurusan NPWP baru, dan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi anggota organisasi yang sudah memiliki NPWP. Serta discussion group untuk memberikan edukasi terkait pengembangan wirausaha dan peluang ekowisata.

## 2. Metode

Langkah-langkah operasional yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat ini disesuaikan dengan permasalahan dan potensi mitra dan dikerjakan sesuai dengan aturan

yang telah ditetapkan. Ketercapaian program dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini:

**Tabel 4.** Metode pelaksanaan yang dilakukan pada Mitra

Masalah	Metode pelaksanaan kegiatan
NPWP	Memberikan pemahaman tentang pajak, mengapa harus membayar pajak dan siapa yang memiliki kewajiban pajak. Membantu administratif dalam pembuatan NPWP dan EFIN Menginformasikan kewajiban Wajib Pajak setelah memiliki NPWP.
Surat Teguran PPh Orang Pribadi.	Memberi informasi tarif dan ketentuan PPh Op sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Memberikan pendampingan perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh Op sesuai Poin 1.
Bisnis stagnan	Memberi materi sosialisasi tentang ekowisata. Diskusi kelompok yang membahas kewirausahaan dan ekowisata.

Upaya yang dilakukan untuk memperlancar rencana kerja di lapangan, maka disusun prosedur kerja dengan tahapan-tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

Penjajagan lokasi,pendekatan dengn kelompok masyaarakat dan mitra.

Wawancara, tanya jawab mengenai permasalahan yang dihadapi peserta kelompok.

Peserta kelompok diberikan ilustrasi materi oleh Tim lapangan.

Pelaksanaan diseminasi dan pendampingan praktek sesuai tema PKM

Eavluasi akhir terhadap hasil pengabdian

Berikut ini merupakan beberapa dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan PKM berlangsung.



**Gambar 3.** Diskusi Tim Pelaksana dan Mitra

I Gusti Agung Prama Yoga., SE., M.Si., BKP, I Wayan Chandra Adyatma., SE., M.Si., I Putu Gede Satria Wiraharja, S.Tr.Par.,M.Sc didampingi oleh Dekan Fakultas Vokasi Dr. Ir. I Wayan Parwata, MT., IPU., ASEAN,. Eng, dan Kaprodi Akuntansi Perpajakan Riza Edwindra, SE., SH., M.Si., Ak., CA, A-CPA, CPA (Aust), BKP. Bersama mitra yang diwakili oleh Ketua Gerakan Wanita Sejahtera Dewan Perwakilan Cabang Denpasar Desak Nyoman Widiasih, S.H., M.H beserta Direktur Rumah Sakit Umum Prima Medika dr. Putu Dian Ekawati,MPH.



**Gambar 4.** merupakan dokumentasi penyampaian materi oleh pelaksana kegiatan PKM

Penyampaian menggunakan metode hybrid, agar seluruh anggota GWS tetap dapat mendapatkan materi sosialisasi walaupun tidak dapat hadir secara offline. Peserta diundang secara daring dan luring, mitra juga meminta agar materi yang disampaikan dapat didokumentasikan secara penuh melalui zoom meeting, dan disimpan untuk diputar kembali. Pelaksana kegiatan terdiri dari 3 orang Narasumber dan Penyuluh (Dosen).



**Gambar 5.** Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi

diberikan Handout materi dan mengisi kuisionerpemahaman sebelum dan sesudah kegiatan. Tim pelaksana menyampaikan materi terkait perpajakan, dan bisnis ekowisata dipandu oleh moderator. Pada saat sesi diskusi, peserta sangat antusias dalam bertanya dan saling memberikan feedback satu sama lain.



**Gambar 6.** Dokumentasi pendampingan perhitungan dan pelaporan Pajak Orang Pribadi

Peserta yang dibantu oleh tim pelaksana yaitu mahasiswa yang didampingi oleh dosen. Selama kegiatan masih banyak peserta yang masih bingung terkait cara perhitungan dan pelaporan SPT menggunakan e-filing dengan mengakses DJP online, maka tim pelaksana membantu dalam prosesnya.

### 3. Simpulan

Melalui kegiatan ini, peserta pendampingan memperoleh pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan peluang bisnis terkait ekowisata. Sehingga peserta dapat terhindar dari sanksi perpajakan karena ketidaktahuan akan aturan perpajakan yang berlaku. Serta mendapatkan masukan dan pertimbangan dalam memodifikasi, mengembangkan, atau mendapatkan ide usaha baru terkait pengembangan peluang ekowisata.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Warmadewa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Vokasi Universitas Warmadewa, Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Warmadewa, Gerakan Wanita Sejahtera, Rumah Sakit Umum Primamedika.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, I Wayan Candra dan Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida. 2021. Analisis Pengaruh Pengalaman Terhadap Kompetensi Serta Pengaruhnya Terhadap Produktivitas UKM di Kota Denpasar, Provinsi Bali. WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan Universitas Warmadewa.
- Badan Pusat Statistik Indonesia .2018. Konsep UMKM. Diunduh pada tanggal 17 Desember 2021 <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2018. Konsep UMKM. Diunduh pada tanggal 17 Desember 2021 <https://www.bps.go.id>
- Doni. 2022. Memberdayakan Perempuan, Membangkitkan Ekonomi. Artikel Kominfo. Disitasi tanggal 29 Januari 2024. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/43692/memberdayakan-perempuan-membangkitkan-ekonomi/0/artikel>
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak
- Kementerian Keuangan RI. 2021. Peran Perempuan dalam Perekonomian Indonesia artikel disitasi tanggal 29 Januari 2024. <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau/id/data-publikasi/berita-terbaru/3282-peran-perempuan-dalam-perekonomian-indonesia.html>
- Nida, Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida, I Gusti Agung Prama Yoga, dan I Wayan Chandra Adyatma. 2021. Analysis of the Impact of Tax Imposition on Electronic Transactions. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications*. ISSN (Online): 2581-6187
- Nida, Desak Rurik Pradnya Paramitha., I Gusti Agung Prama Yoga, I Nyoman Angga Prabawa. 2023. Pendampingan BUPDA Desa Bangbang. *Community Services Journal (CSJ)*. Vol. 6 nO.1 (2023)
- Mardiasmo. (2014). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- OCBC. 2023/ Pentingnya Peran Perempuan dalam Bidang Perekonomian. Artikel disitasi tanggal 29 Januari 2024. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/04/03/peran-perempuan-dalam-ekonomi>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku I. Jakarta : Salemba Empat
- Yoga, i Gusti Agung Prama, Desak Rurik Pradnya Paramitha Nida, dan Ida I Dewa Ayu Mas Manik Sastri. 2022. Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Dengan Pendampingan Akuntansi Dan Pemberdayaan Bank Sampah. *Jurnal Akuntansi Humaniora, Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 1 No. 2 (2022): Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Juni – September 2022. Doi: <https://doi.org/10.38142/Ahjpm.V1i2.315>). ISSN-2829-0771